





SIDALI

Sistem Informasi Pengedalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik



DAFTAR ISI

Panduan Menu

DAFTAR ISI	i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL	ii
1. Panduan untuk umum	1
A. Alamat Website SIDALI	1
B. Menu Home	1
C. Menu Buat Laporan	2
D. Menu Pemantauan	6
2. Panduan untuk perguruan tinggi	8
A. Menu Home/Login	8
B. Menu Pemantauan	9
C. Menu Pengajuan Keberatan	10
1. Permohonan Keberatan	10
2. Jawaban Keberatan	12
3. Jawaban Banding	15
D. Menu Dokumen Perbaikan	17
E. Menu Pencabutan Sanksi	19
1. Permohonan	19
2. Jawaban	21
F. Buku Panduan	23
5. Daftar Pelanggaran dan Sanksi	23

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL

Sudah semestinya semua penyelenggaraan pendidikan tinggi di negeri ini memenuhi standar. Standar yang dimaksud adalah Standar Nasional Pendiddikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada saat pendirian perguruan tinggi seharusnya memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, ada yang tidak memenuhi standar, baik sebagian kecil maupun keseluruhan poin-poin standar itu.

Terhadap perguruan tinggi yang berpotensi tidak memenuhi standar, Kementerian telah melakukan pembinaan, baik secara periodik maupun insidental. Pembinaan tersebut dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek, juga dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) di wilayah masing-masing. Dengan tidak dipenuhinya standar penyelenggaraan, maka perguruan tinggi telah melakukan pelanggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, terdapat tiga kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran yang dikenai sanksi administratif ringan, pelanggaran yang dikenai sanksi administratif sedang, dan pelanggaran yang dikenai sanksi administratif berat.

Terkait dengan pelanggaran itu, sanksi yang dikenakan mulai dari sanksi administratif ringan, sedang, hingga berat yang berakibat dikenakannya teguran hingga pencabutan izin program studi dan/atau institusi perguruan tinggi.

Adapun dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara dapat berasal dari (a) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri; (b) hasil pemantauan dan evaluasi LLDIKTI; (c) hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian; (d) hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah; (e) hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah; (f) laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/tulisan; dan/atau (g) pemberitaan melalui media massa.

Untuk mewadahi laporan/pengaduan itu, Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik (Sidali) ini dibuat. Lewat sebuah sistem informasi, setiap pelapor dapat menyampaikan laporannya secara akurat dan bertanggung jawab serta dijamin kerahasiaannya, sedangkan Kementerian dapat merespons dan memberikan layanan secara transparan, terukur, dan akuntabel.

Untuk memberikan panduan secara praktis terhadap para pengguna Sidali, baik terhadap masyarakat pelapor, pihak perguruan tinggi selaku terlapor, LLDikti, maupun Dikti, Buku Panduan Sidali

ini disusun. Diharapkan panduan ini dapat menjadi pedoman yang praktis dan efektif bagi kepentingan pelaporan maupun penanganan.

Jakarta,

Plt. Dirjen Diktiristek.

NIZAM

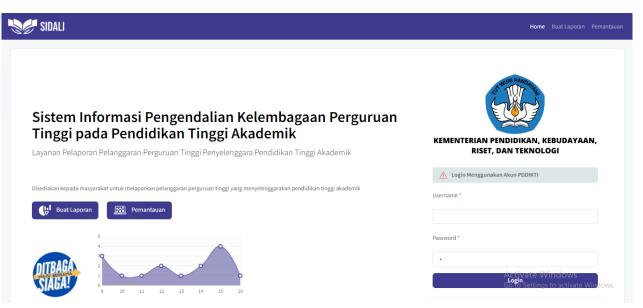
1. Panduan untuk umum

A. Alamat Website SIDALI

Alamat website dari SIDALI ini sendiri ialah https://sidali.kemdikbud.go.id

B. Menu Home

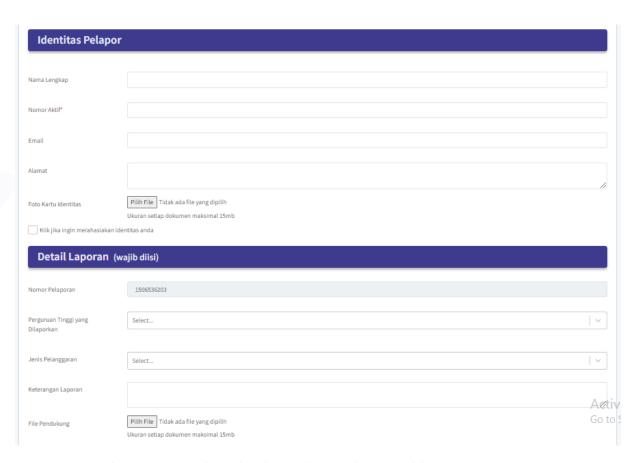
Berikut tampilan Menu Home aplikasi SIDALI (Sistem Informasi Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi pada Pendidikan Tinggi Akademik).



Gambar 1. 1 Menu Home

C. Menu Buat Laporan

Berikut tampilan Menu Buat Laporan, sebagaimana pada gambar 1.2 *user public* dapat membuat laporan dugaan pelanggaran dengan mengisi *form* yang telah disediakan.



Gambar 1. 2 Menu untuk membuat laporan dugaan pelanggaran oleh perguruan tinggi



• Langkah – langkah membuat laporan dugaan pelanggaran. Klik ikon buat laporan untuk menampilkan halaman pengisian pembuatan laporan dugaan pelanggaran, sebagaimana pada Gambar 1.3.



Gambar 1. 3 Langkah - langkah membuat laporan dugaan pelanggaran

Keterangan dan panduan pengisian identitas detail laporan.

Identitas Pelapor		
Nama Lengkap 1		
Nomor Aktif*		
Email 3		
Alamat 4		//
Foto Kartu Identitas	PRINTER T tak ada file yang dipilih Ukuran setiap dekumen maksimal Emb	
Klik jika ingin merahasiakan identitas anda	6	
Detail Laporan (wajib diisi)	
Nomor Pelaporan	1506536203	
Perguruan Tinggi yang Dilaporkan	Select	~
Jenis Pelanggaran 9	Select	~
Keterangan Laporan 10		//
File Pendukung 11	Pilih File dala ada file yang dipilih Ukuran setiap dekumen maksimat 15mb	
Ilik jika data yang anda laporkan sudah ben	ar 112	
		Kirim Laporan

Gambar 1. 4 Pengisian identitas dan detail laporan

1. Nama Lengkap Pelapor

Isi formulir tersebut sesuai dengan kartu identitas pelapor.

2. Nomor yang dapat dihubungi

Isi formulir tersebut dengan nomor telepon pelapor yang masih aktif.

3. Email

Isi formulir tersebut dengan alamat email pelapor yang masih aktif.

4. Alamat

Isi formulir tersebut dengan alamat pelapor yang sesuai dengan kartu identitas pelapor.

5. Foto kartu Identitas

Klik ikon **Pilih File** untuk mengupload file berupa foto kartu identitas pelapor.

6. Checklist

Jika pelapor ingin merahasiakan identitasnya, klik checklist pada opsi tersebut.

Klik jika ingin merahasiakan identitas anda

7. Nomor Pelaporan

Pelapor akan mendapatkan nomor pelaporan secara otomatis setiap pelapor mengadukan pelanggaran.

8. Perguruan Tinggi yang Dilaporkan,

Select, untuk memilih perguruan tinggi yang akan dilaporkan.

9. Jenis Dugaan Pelanggaran,

Select, untuk memilih jenis dugaan pelanggaran yang akan dilaporkan, daftar pelanggaran dapat dilihat pada <u>Daftar Pelanggaran</u>

10. Keterangan Laporan

Isi formulir tersebut dengan keterangan mengenai laporan yang dibuat.

11. File Pendukung

Klik ikon Pilih File untuk mengupload file pendukung mengenai laporan yang dibuat.

12. Checklist

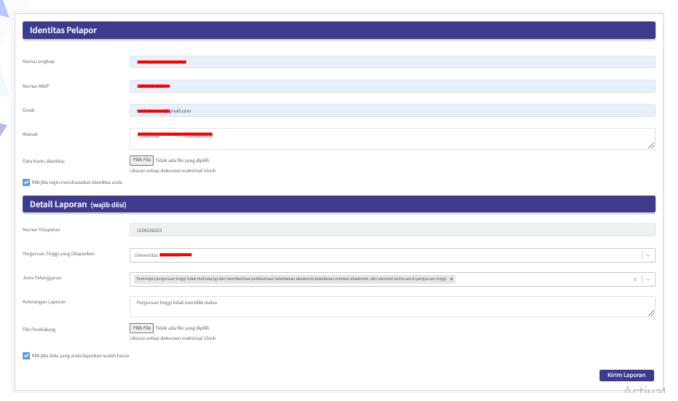
Checklist jika laporan sudah dinyatakan benar dan sesuai.

Klik jika data yang anda laporkan sudah benar

13. Kirim Laporan

Klik ikon untuk mengirimkan laporan yang sudah dibuat oleh pelapor.

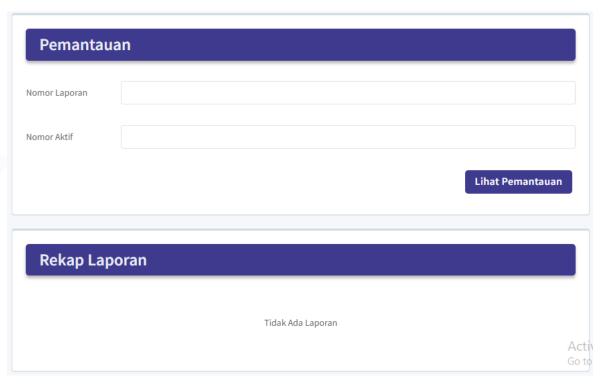
Berikut contoh pengisian identitas dan detail laporan



Gambar 1. 5 Contoh pengisian identitas dan detail laporan

D. Menu Pemantauan

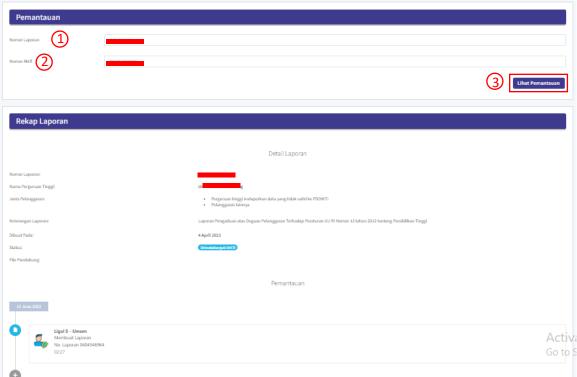
Berikut tampilan Menu Pemantauan, sebagaimana pada gambar 1.6 *user public* dapat memantau perkembangan laporan yang dibuat dengan menginput nomor laporan dan nomor telepon pelapor yang dicantumkan pada saat pembuatan laporan.



Gambar 1. 6 Lihat Hasil Pemantauan



Keterangan dan panduan melihat hasil pemantauan



Gambar 1. 7 Lihat Hasil Pemantauan

1. Nomor Laporan

Isi formulir tersebut dengan nomor laporan yang didapatkan pelapor pada saat melakukan pelaporan.

2. Nomor yang dapat dihubungi

Isi formulir tersebut dengan nomor telepon yang dicantumkan pelapor pada saat melakukan pelaporan.

3. Lihat Pemantauan

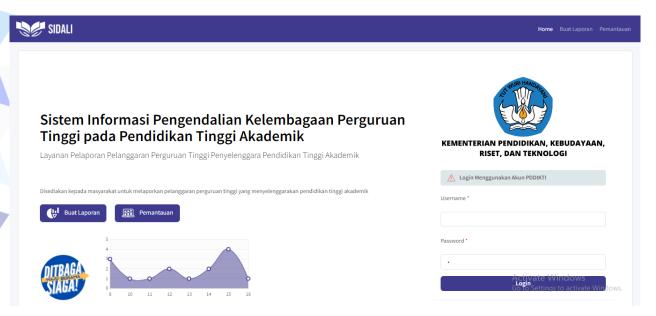
klik ikon untuk menampilkan hasil pemantauan laporan.

2. Panduan untuk perguruan tinggi

User perguruan tinggi hanya dikhususkan dibuat kepada perguruan tinggi yang memiliki record laporan dugaan pelanggaran.

A. Menu Home/Login

Berikut tampilan Menu *Home*, sebagaimana pada gambar 2.1 *user* perguruan tinggi dapat *login* dengan menggunakan akun PDDIKTI dengan meng*input User*name dan *Password*.



Gambar 2. 1 Menu Home

• Keterangan dan panduan untuk login



Gambar 2. 2 Pengisian form login

1. Username

Isi formulir tersebut dengan username pengguna.

2. Password

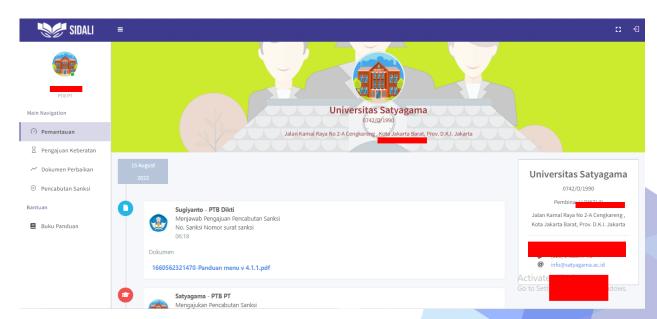
Isi formulir tersebut dengan password pengguna.

3. Login

Klik ikon untuk login.

B. Menu Pemantauan

Setelah *login* akan diarahkan pada menu pemantauan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat memantau progres penanganan laporan dugaan pelanggaran, berikut tampilan menu pemantauan.



Gambar 2. 3 Menu Pemantauan

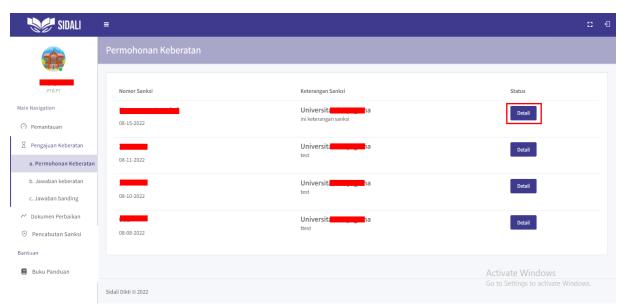
C. Menu Pengajuan Keberatan

Pada menu pengajuan keberatan *user* perguruan tinggi mencakup *form* permohonan keberatan atas sanksi yang diberikan dan permohonan banding. Terhadap sanksi yang dikenakan, perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju. Jika perguruan tinggi tidak mengajukan keberatan, maka perguruan tinggi dapat langsung melakukan perbaikan dan menghentikan pelanggaran.

1. Permohonan Keberatan

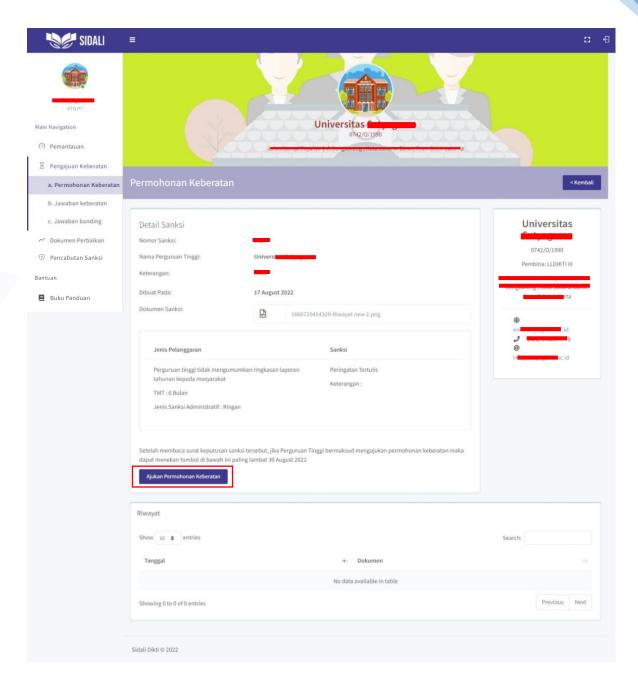
Berikut tampilan Menu Permohonan Keberatan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi yang diberikan dengan panduan berikut.

Klik Detail, untuk menampilkan halaman permohonan keberatan.



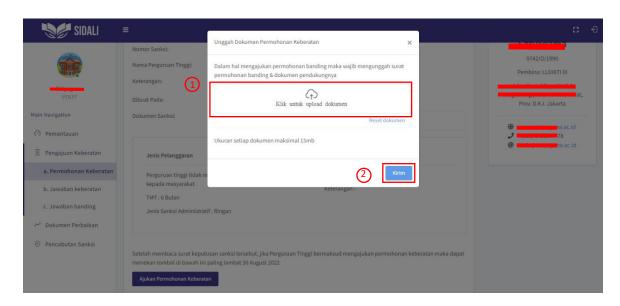
Gambar 2. 4 Menu Permohonan Keberatan

• Klik ikon **Ajukan Permohonan Keberatan**, untuk mengkonfirmasi bahwa perguruan tinggi melakukan pengajuan permohonan keberatan.



Gambar 2. 5 Pengajuan dokumen permohonan keberatan

• Pengunggahan surat permohonan keberatan atas mengenai sanksi administrasi dan dokumen pendukungnya.



Gambar 2. 6 Pengunggahan Dokumen Permohonan

1. Drop files here to upload

Klik kemudian unggah dokumen permohonan keberatan, berupa surat permohonan keberatan atas penetapan sanksi dan dokumen penyerta yang dianggap perlu.

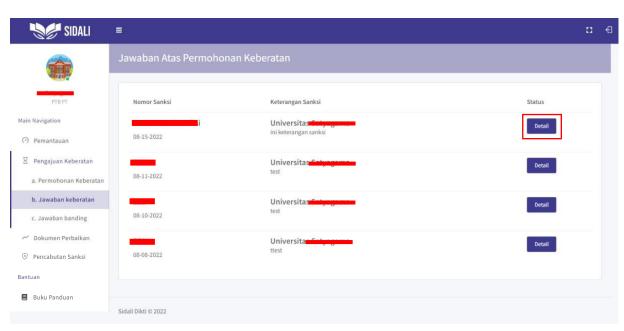
2. Kirim

Klik ikon kirim untuk mengirim dokumen permohonan keberatan.

2. Jawaban Keberatan

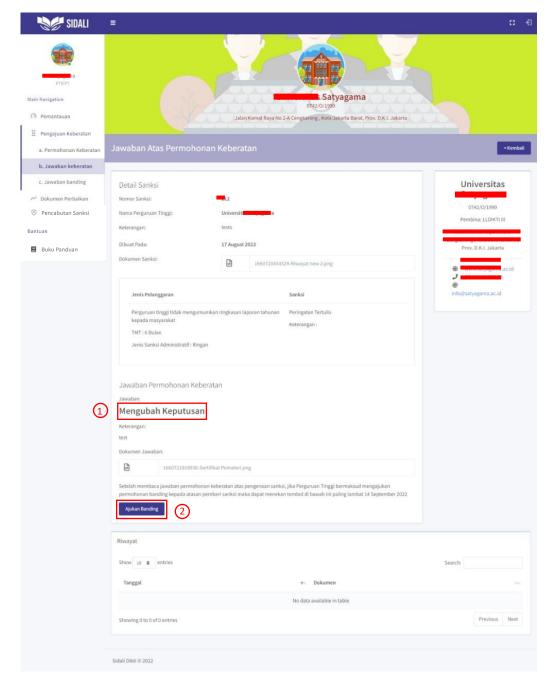
Berikut tampilan Menu Jawaban Keberatan, sebagaimana pada gambar 2.8 *user* perguruan tinggi mendapatkan jawaban atas surat permohonan keberatan yang telah diajukan.

Klik Detail, untuk menampilkan halaman jawaban keberatan.



Gambar 2. 7 Menu Jawaban keberatan





Keterangan dan panduan pengiriman surat pengajuan banding

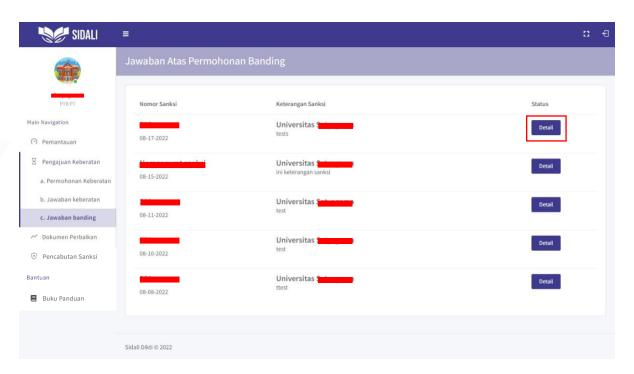
Gambar 2. 8 Menu jawaban permohonan keberatan

- 1. Menerangkan hasil jawaban atas permohonan keberatan yang diusulkan.
- Terhadap permohonan keberatan yang ditolak, user perguruan tinggi dapat mengajukan banding dan upload surat permohonan banding seperti pada permohonan keberatan. Klik ikon Ajukan banding, untuk pengajuan banding kepada Direktorat Jenderal atau Menteri.

3. Jawaban Banding

Berikut tampilan Menu Jawaban Banding, pada menu ini *user* perguruan tinggi mendapatkan jawaban atas surat pengajuan banding yang telah diajukan.

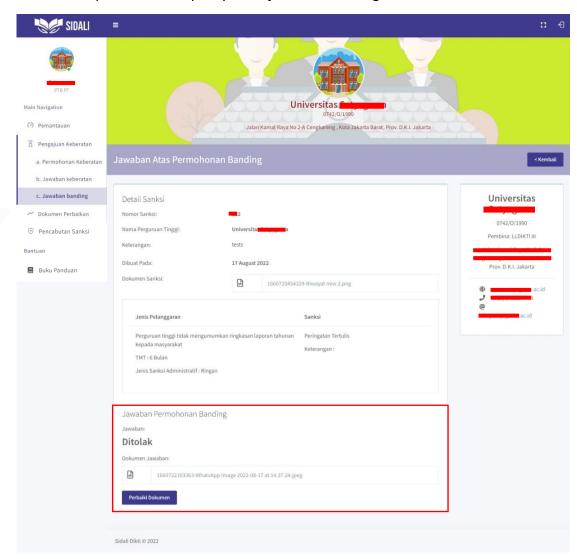
• Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman jawaban atas permohonan banding.



Gambar 2. 9 Menu Jawaban Banding



Berikut tampilan halaman pernyataan jawaban banding.

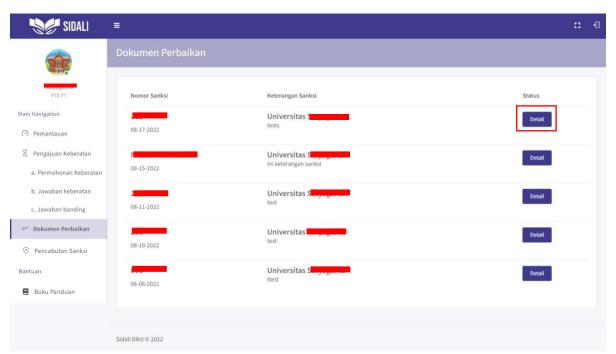


Gambar 2. 10 Jawaban banding

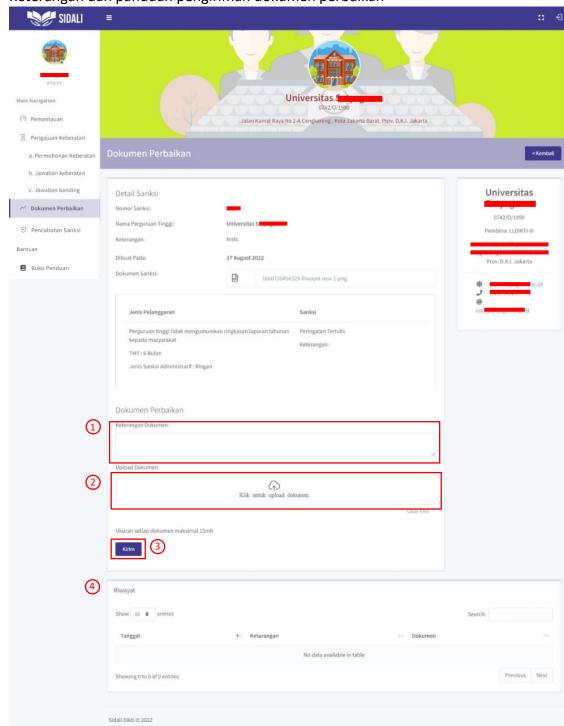
D. Menu Dokumen Perbaikan

Berikut tampilan Menu Dokumen Perbaikan, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengupload dokumen bukti adanya upaya perbaikan oleh perguruan tinggi dan bukti telah menghentikan pelanggaran.

• Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman pengisian dokumen perbaikan.



Gambar 2. 11 Menu Dokumen Perbaikan



Keterangan dan panduan pengiriman dokumen perbaikan

Gambar 2. 12 Menu Pengisian Dokumen Perbaikan

Keterangan Dokumen
 Isi formulir tersebut dengan keterangan mengenai dokumen usaha perbaikan yang akan dikirim.

- Drop files here to upload Klik ikon untuk unggah dokumen perbaikan.
- 3. Kirim
 Klik ikon untuk mengirim dokumen bukti usaha perbaikan.
- 4. Riwayat jika *user* perguruan tinggi sudah mengirim dokumen bukti usaha perbaikan.

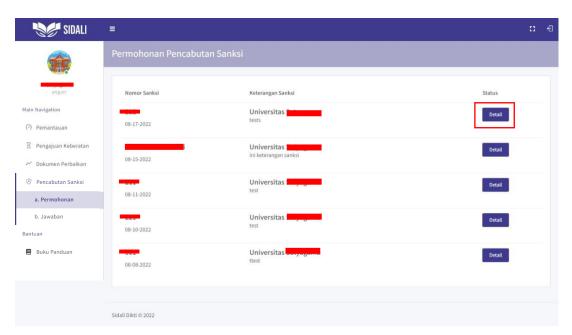
E. Menu Pencabutan Sanksi

Pada menu ini mencakup permohonan pencabutan sanksi oleh user perguruan tinggi

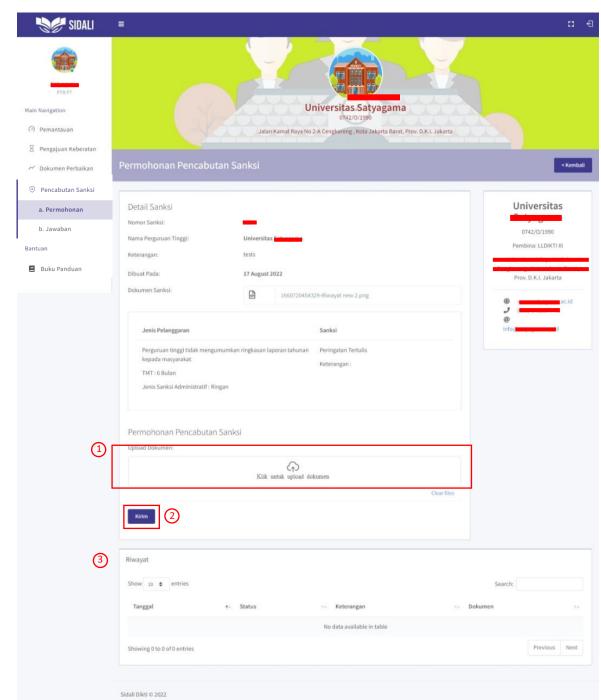
1. Permohonan

Berikut tampilan Menu Permohonan Pencabutan Sanksi, pada menu ini *user* perguruan tinggi dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi yang diberikan dengan panduan berikut.

• Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman permohonan pencabutan sanksi



Gambar 2. 13 Menu Permohonan Pencabutan Sanksi



• Keterangan dan panduan pengiriman surat permohonan pencabutan sanksi

Gambar 2. 14 menu Permohonan Pencabutan Sanksi

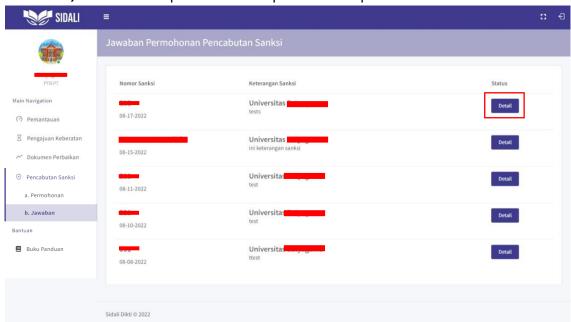
- Drop files here to upload
 Klik untuk unggah dokumen permohonan keberatan.
- KirimKlik ikon kirim untuk mengirim dokumen permohonan keberatan.

3. Riwayat jika *user* perguruan tinggi sudah mengirim surat Pemohonan pencabutan Sanksi.

2. Jawaban

Berikut tampilan Menu Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi, pada menu ini *user* perguruan tinggi mendapatkan jawaban atas surat permohonan pencabutan sanksi yang telah diajukan.

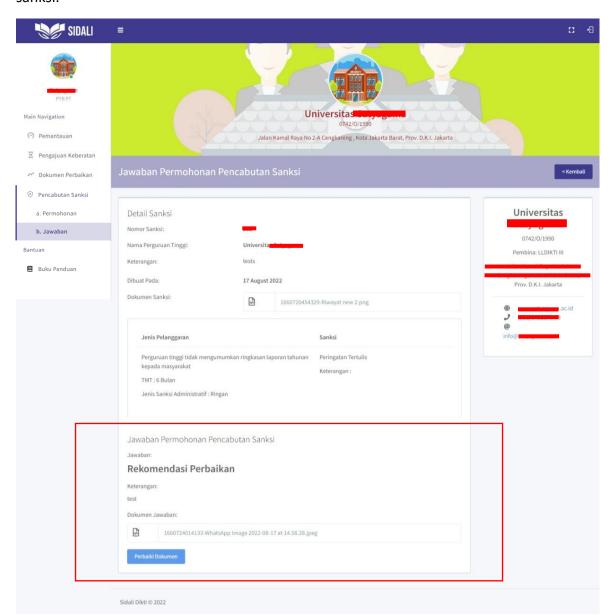
• Klik **Detail**, untuk menampilkan halaman permohonan pencabutan sanksi.



Gambar 2. 15 Menu Jawaban Permohonan Pencabutan sanksi



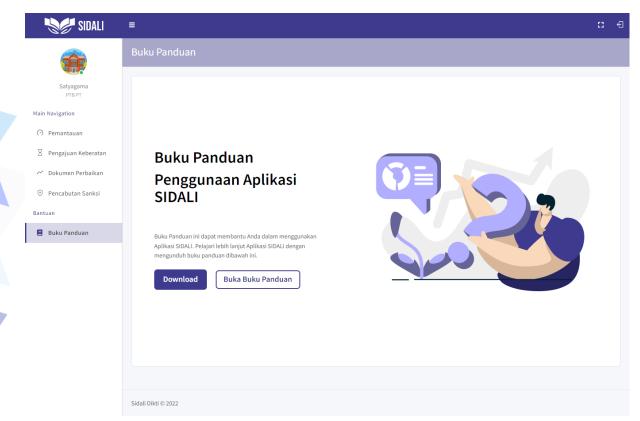
• Berikut tampilan halaman pernyataan jawaban permohonan pencabutan sanksi.



Gambar 2. 16 Jawaban Permohonan Pencabutan Sanksi

F. Buku Panduan

Pada halaman ini *user* dapat melihat tampilan untuk mengunduh ataupun melihat buku panduan dari penggunaa Aplikasi SIDALI ini.



Gambar 2. 17 Buku Panduan

5. Daftar Pelanggaran dan Sanksi

Berikut daftar Pelanggaran dan Sanksi

NO	Pelanggaran	Sanksi
1	Tidak Ada	Tanpa Sangsi
2	Pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik,kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi	Peringatan Tertulis
3	Perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama,Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya	Peringatan Tertulis
4	Perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama	Peringatan Tertulis

5	Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum	Peringatan Tertulis
6	PTN tidak menerima calon Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi penerimaan Mahasiswa secara nasional	Peringatan Tertulis
7	PTN tidak mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi	Peringatan Tertulis
8	Perguruan tinggi tidak memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik	Peringatan Tertulis
9	Perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa Indonesia	Peringatan Tertulis
10	Pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang non akademik	Peringatan Tertulis
13	Perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Peringatan Tertulis
12	Perguruan tinggi memiliki Dosen tetap kurang dari 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi	Peringatan Tertulis
13	Perguruan tinggi tidak memenuh nisbah Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Peringatan Tertulis
14	Perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi	Peringatan Tertulis
15	Program sarjana memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat	Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintahan pusat
16	Program magister memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
17	Program doktor memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
18	Program diploma memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
19	Program magister terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
20	Program doktor terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan

	21	Program profesi memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
	22	Program spesialis memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
	23	Perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil plagiat	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
X	24	Perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki Sumber Belajar sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
	25	Perguruan tinggi tidak memiliki statuta	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
	26	Perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
	27	Perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke PDDIKTI	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
	28	Perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan seluruh Standar Nasional Pendidikan Tinggi	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
	29	Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan
	30	Perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi	Penghentian pembinaan
	31	Perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak	Penghentian pembinaan
	32	Perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan	Penghentian pembinaan
	33	Perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penghentian pembinaan
-	34	Perguruan tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru dengan tujuan komersial	Penghentian pembinaan
Ī	35	Pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba	Penghentian pembinaan
	36	Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama dan/atau bentuk Badan Penyelenggara, dan/atau lokasi Kampus Utama PTS tanpa izin dari	Pencabutan izin Program Studi
		Menteri	

37	Perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi tanpa izin dari Menteri	Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS
38	Perguruan tinggi menyelenggarakan PJJ tanpa izin dari Menteri	Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS
39	Perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi	Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS
40	Terjadi sengketa	Pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS
41	Pelanggaran Lainnya	Pelanggaran Lainnya